Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 5 No 3 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

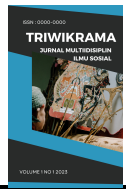

STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Nico Andrean
Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 2024
Revised Oktober 2024
Accepted Oktober 2024
Available online Oktober 2024

Email:
nicoandrean50@gmail.com

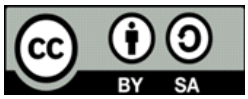

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRACT

Corruption is a serious threat that damages various fundamental aspects of society, including the economy, politics, and social order. Efforts to prevent corruption are essential to create a clean and accountable environment. This article discusses strategies for preventing corruption in the community, including education and outreach, utilization of technology, and strengthening community participation. Anti-corruption education must begin early to shape the character of the younger generation. In addition, collaboration between the government, civil society, and the private sector is essential to building an anti-corruption culture. Community participation in monitoring and reporting acts of corruption is the key to the success of this strategy. By actively involving the community, it is hoped that a transparent and accountable environment can be created, as well as reducing corrupt practices in various sectors.

Keywords: *Corruption, prevention, community, anti-corruption education, community participation, transparency, accountability.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan ancaman serius yang merusak berbagai aspek fundamental masyarakat, termasuk perekonomian, politik, dan tatanan sosial. Upaya pencegahan korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan akuntabel. Artikel ini membahas strategi pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat, yang meliputi pendidikan dan penyuluhan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini untuk membentuk karakter generasi muda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk membangun budaya anti-korupsi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang transparan dan akuntabel, serta mengurangi praktik korupsi di berbagai sektor.

Kata Kunci: Korupsi, Pencegahan, Masyarakat, Pendidikan Anti-Korupsi, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi ancaman serius yang merusak berbagai aspek fundamental dalam masyarakat, termasuk perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial. Dampaknya tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan menciptakan efek berantai yang mengganggu keberlangsungan dan stabilitas bangsa dan negara. Ketika korupsi merajalela, kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pemerintahan pun menurun, yang mengakibatkan krisis legitimasi dan partisipasi publik.Menghadapi permasalahan ini, pencegahan korupsi menjadi suatu keharusan. Strategi pencegahan yang efektif perlu melibatkan beragam para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, sektor swasta,

dan organisasi masyarakat sipil, agar upaya tersebut lebih efektif. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mengawasi dan memantau praktik-praktik yang mencurigakan. [1]

Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam pencegahan korupsi, maka peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel akan semakin besar. Strategi nasional yang melibatkan gerakan masyarakat dan partisipasi luas dari civil society berperan penting dalam memerangi praktik korupsi yang semakin parah, atau yang dikenal sebagai hypercorruption. Dengan masyarakat yang aktif berfungsi sebagai mitra pemerintahan, peluang untuk menangani masalah ini menjadi jauh lebih besar. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih efektif serta penguatan akuntabilitas di semua level pemerintahan.[2]

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat dan terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.[3] Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah edukasi dan penyuluhan tentang korupsi, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur.. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi buruk dari korupsi dan hak-hak mereka sebagai warga negara, individu dapat menjadi agen perubahan yang proaktif. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dengan lebih mudah dan aman.

Di samping itu, penguatan jaringan komunitas dan organisasi masyarakat sipil juga merupakan langkah penting dalam membangun solidaritas dan kerjasama antarwarga. Program-program berbasis komunitas dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu terkait korupsi dan mencari solusi bersama. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan sekitar mereka.

Pendidikan anti-korupsi sebaiknya dimulai sejak usia dini, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendekatan ini memiliki potensi besar dalam membentuk karakter dan psikologi generasi muda. Dengan mengintegrasikan materi tentang anti-korupsi ke dalam kurikulum, siswa akan mendapatkan pengetahuan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas. Ketika mereka terjun ke masyarakat, diharapkan mereka akan memiliki landasan yang kuat untuk menolak praktik korupsi dan berpartisipasi secara aktif dalam membangun suasana yang jujur dan terbuka.[4]

Pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi di institusi pendidikan tinggi merupakan langkah preventif yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui gerakan anti-korupsi. Salah satu cara untuk mencegah tindakan korupsi adalah dengan membentuk karakter anti-korupsi yang ditanamkan melalui budaya yang mendukung integritas, peningkatan kesadaran hukum, dan nilai-nilai moral di kalangan mahasiswa.[5]

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi di tingkat masyarakat sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarberbagai stakeholder. Oleh karena itu,

---

[1] Hendarto, D., & Sulistyo, E. (2023). Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 5(2), 38-44

[2] Sujatmiko, I. G. (2002). Hypercorruption dan strategi pemberantasan korupsi. Indonesian Journal of Criminology, 2(1), 4217.

[3] Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, *12*(1).

[4] Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *1*(2), 308-315.

[5] Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(2), 241-255.

dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum untuk merumuskan strategi yang komprehensif dan adaptif. Dengan pendekatan holistik, diharapkan dapat tercipta budaya anti-korupsi yang menyeluruh, sehingga masyarakat mampu menanggulangi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.

Dengan menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter dalam upaya pencegahan korupsi, kita dapat menciptakan fondasi untuk masyarakat yang lebih beretika dan terbebas dari praktik korupsi. Pendidikan karakter berfungsi sebagai sarana untuk membentuk nilai-nilai moral yang kuat, yang pada gilirannya mendorong individu untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, melalui pendidikan yang menekankan pada aspek karakter, kita dapat membangun generasi yang tidak hanya sadar akan dampak negatif korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk menentangnya.

Langkah pencegahan korupsi juga dapat dilakukan di kalangan eksekutif atau lembaga pemerintah, di mana setiap instansi memiliki Unit Pengendalian Internal yang berfungsi sebagai inspektorat. Tugas inspektorat adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap instansi, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dijalankan dengan efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.[6]

Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat, mulai dari pendidikan dan penyuluhan, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan peran serta masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan korupsi, Diharapkan individu dan komunitas dapat memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Dengan langkah ini, kita dapat mengharapkan masa depan yang lebih baik, di mana korupsi tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, melainkan hanya menjadi bagian dari sejarah yang telah berlalu.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Masyarakat?
2. Seberapa pentingnya mendorong partisipasi Masyarakat dalam pencegahan korupsi?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. penelitian ini akan menganalisis peran berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan individu, dalam membangun kesadaran dan tindakan anti-korupsi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan aktivis anti-korupsi untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan pada kegiatan pencegahan korupsi di komunitas untuk memahami dinamika interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Data dari studi kasus di daerah yang berhasil menerapkan strategi pencegahan juga akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di masyarakat serta membangun budaya anti-korupsi yang lebih kuat.

IV. PEMBAHASAN

A. Strategi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Masyarakat

[6] Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *6*(3), 01-01.

Tindak pidana korupsi adalah ancaman yang serius, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi dapat menghambat pembangunan, memperburuk ketidakadilan sosial, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pencegahan yang efektif di lingkungan masyarakat. Salah satu tindakan awal yang bisa diambil adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif korupsi, sehingga mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan masyarakat akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan.

Pendidikan antikorupsi memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas di kalangan generasi muda. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan prinsip-prinsip tersebut kepada siswa. Melalui kurikulum yang dirancang khusus, nilai-nilai antikorupsi dapat disisipkan dalam berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, agama, dan bahkan sains.[7] Misalnya, dalam Pendidikan Kewarganegaraan, siswa tidak hanya diajarkan mengenai hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, serta juga tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan korupsi dan mendorong mereka untuk mengembangkan sikap kritis terhadap perilaku tidak etis. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik, sasaran yang ingin dicapai, dan prinsip keberlanjutan. Dengan menetapkan target yang jelas, langkah-langkah yang diambil dalam pemberantasan korupsi akan menjadi lebih terfokus dan efektif. Penetapan target memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengukur kemajuan dan hasil yang dicapai, sehingga setiap langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan situasi yang ada.[8]

Menciptakan budaya anti-korupsi harus menjadi prioritas. Kampanye kesadaran di sekolah, tempat kerja, dan komunitas dapat membantu menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dengan demikian, generasi mendatang akan tumbuh dengan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pencegahan korupsi. Di samping itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi langkah penting. Akses masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran pemerintah harus dipermudah, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai pengawas.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya berhenti di lingkungan sekolah. Masyarakat luas juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui kampanye kesadaran publik, informasi tentang dampak korupsi dan cara-cara untuk menanganinya dapat disebarluaskan. Media, baik cetak maupun elektronik, berperan penting dalam hal ini. Kampanye yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dapat membantu membentuk opini publik yang menentang korupsi. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi publik juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu korupsi dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pencegahannya.

Selain pendidikan dan kesadaran publik, penting juga untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi korup. Pemerintah harus memastikan bahwa ada sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat perlu diberikan akses untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berperan sebagai

[7] Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *4*(1), 44-44.
[8] Santiago, F. (2014). Strategi pemberantasan kejahatan korupsi: kajian legal sosiologis. *Jurnal Lex Publica*, *1*(1), 54-68.

pengawas yang aktif dan melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui.[9] Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan dan platform digital, dapat memudahkan masyarakat agar melaporkan tindakan korupsi tanpa takut menghadapi balas dendam.

Kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Organisasi non-pemerintah seringkali memiliki pengetahuan dan sumber daya yang dapat mendukung program-program antikorupsi. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui program-program kolaboratif, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil dapat mengedukasi masyarakat dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memberantas korupsi.

Penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, misalnya melalui forum-forum pemantau independen yang dapat memberikan laporan tentang dugaan korupsi. Selain itu, penting untuk menyediakan sistem pelaporan yang aman dan anonim guna mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa khawatir akan adanya balas dendam. Penting juga untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan workshop, sehingga mereka memahami cara melaporkan kasus dan berpartisipasi dalam pengawasan publik.

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan dalam upaya pencegahan ini. Melalui sinergi, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk memperkuat strategi yang diterapkan. Penggunaan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan. Aplikasi atau platform online dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan dan memantau kasus-kasus korupsi secara lebih efisien. Selain itu, penting untuk memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten terhadap para pelaku korupsi juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu melihat bahwa tindakan korupsi akan berujung pada sanksi yang berat, sehingga menimbulkan efek jera bagi calon pelaku.[10]

Peran media massa dalam memberantas korupsi juga sangat signifikan. Media berfungsi sebagai pengawas publik yang dapat mengungkap kasus-kasus korupsi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pelatihan bagi jurnalis untuk melaporkan isu korupsi secara objektif dan akurat perlu diadakan. Selain itu, mendorong partisipasi politik masyarakat juga menjadi strategi penting. Dengan emberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, kita dapat memperkuat akuntabilitas pejabat publik.

Akhirnya, kerja sama antarnegara dalam pencegahan korupsi sangat penting, mengingat banyak kasus korupsi bersifat lintas negara. Berbagi informasi dan pengalaman dengan negara lain akan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara komprehensif, diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Langkah-langkah ini memerlukan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi membangun lingkungan yang bebas dari korupsi.

---

[9] Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *2*(3).

[10] Nabila, D., Kesuma, R. P., & Evangelia, J. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KERJA. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(5), 58-65.

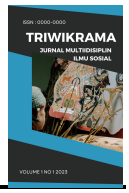

B. Pentingnya Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi

Pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sangat krusial untuk membangun lingkungan yang bersih dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menentang korupsi dan mendukung integritas publik. Korupsi telah menjadi isu yang kerap muncul dan memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena ini menyebabkan banyak masalah yang mengganggu tatanan sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan berbagai kekacauan dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi korupsi secara efektif, penegak hukum sangat memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat.[11]

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi sangatlah krusial, karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam memantau serta menginformasikan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk penyimpangan.

Selain itu, partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan anti korupsi yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka lebih cenderung mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta berkontribusi dengan memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini menciptakan interaksi yang lebih positif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya penggalangan masyarakat yang efektif. Strategi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan terbentuknya rasa kepemilikan terhadap isu korupsi, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.[12]

Akhirnya, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif. Melalui diskusi, seminar, dan kampanye penyuluhan, masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang mekanisme korupsi dan cara-cara untuk menghindarinya. Dengan pengetahuan yang memadai, individu akan lebih berdaya untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan yang mendukung integritas, sehingga pencegahan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

V. KESIMPULAN

Pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat merupakan langkah krusial untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan dan penyuluhan yang sistematis, masyarakat dapat diberdayakan dengan pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan serta kampanye kesadaran publik dapat membentuk generasi yang kritis dan proaktif dalam melawan praktik korupsi. Pentingnya partisipasi masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat harus

[11] Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(14), 500-512.

[12] Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *1*(1), 1-15.

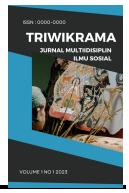

berperan aktif sebagai pengawas dan agen perubahan, yang tidak hanya melaporkan tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk membangun strategi pencegahan yang komprehensif. Peningkatan akses terhadap informasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan tindakan korupsi juga akan memperkuat upaya pencegahan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat, diharapkan pencegahan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat, serta dukungan dari lembaga pengawas yang kuat, korupsi dapat diminimalisir, sehingga praktik korupsi yang merugikan dapat menjadi masa lalu dan digantikan oleh budaya integritas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Hendarto, D., & Sulistyo, E. (2023). Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 5(2), 38-44*

Sujatmiko, I. G. (2002). Hypercorruption Dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Indonesian *Journal Of Criminology, 2(1), 4217.*

Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(1).

Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal Of Accounting Law Communication And Technology, 1(2), 308-315.*

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Perkara*: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 241-255.*

Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 6(3), 01-01.*

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: *Journal Of Law & Family Studies, 4(1), 44-44.*

Santiago, F. (2014). Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis. *Jurnal Lex Publica, 1(1), 54-68.*

Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Recidive: *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 2(3)*

Nabila, D., Kesuma, R. P., & Evangelia, J. (2024). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kerja. Kultura: *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(5), 58-65.*

Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 500-512.*

Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 1(1), 1-15.*